

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Keuangan merupakan hal yang sangat dibutuhkan terutama dalam penyajian informasi. Laporan keuangan yang disajikan sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan seperti pemerintah daerah yang dipercayai dan diamanatkan oleh masyarakat untuk mengelola keuangan negara. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu (Kasmir 2018:7). Laporan keuangan merupakan suatu landasan informasi bagi penggunaannya sebagai salah satu elemen dalam proses pengambilan keputusan. Selain sebagai informasi, laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai proses dalam pengambilan keputusan dan juga memberikan gambaran sebagai indikator keberhasilan satu pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya (Ariska, Masniadi, dan Rachman 2019)

Laporan keuangan (*Financial Statement*) merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi, sebagai ikhtisar dari transaksi-transaksi keuangan selama periode berjalan (Pirmatua Sirait, 2014:19). Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Laporan Keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan sektor publik adalah suatu laporan yang merepresentasikan posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik (Indra Bastian, 2010:297)

Kualitas Laporan Keuangan adalah ukuran orang yang menilai atau merinci dari suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan transaksi ekonomi yang menyatakan aktivitas yang berhubungan dengan uang dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintahan daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (Fajri 2013:4).

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan menjadi media bagi sebuah entitas, dalam hal ini pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menggambarkan keluaran atau hasil dari kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur sehingga dapat menjelaskan kinerja dan tanggung jawab pengelolaan anggaran keuangan selama satu periode tertentu. (Firdaus, Nadirsyah, dan Fahlevi. 2015)

Pada tahun 2016 BPK mencatat, terdapat 378 LKPD (70%) meraih opini WTP dan menjadi 486 LKPD (90%) pada tahun 2020. Ketua BPK mengatakan, peningkatan kualitas LKPD tersebut karena Pemda telah melakukan perbaikan. Akan tetapi terdapat 55 LKPD belum memperoleh opini WTP. terdapat 10 pemda yang memiliki permasalahan terkait PC-PEN yang berdampak terhadap kewajaran

penyajian LKPD Tahun 2020 selain itu meski memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), lembaga nya menemukan sejumlah temuan masalah yang bisa berujung pada kerugian negara. Permasalahan itu terdiri dari 28 persen kelemahan sistem, 29 persen ketidakpatuhan, dan 43 persen ketidakhematan, ketidakefisienan, hingga ketidakefektifan"(Agung Firman Sampurna 2020)

Menurut Ketua BPK diketahui terdapat 55 LKPD belum memperoleh opini WTP. Penyebabnya, masih ditemukan ketidaksesuaian LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau ketidakcukupan bukti untuk mendukung kewajaran LKPD. Secara umum, permasalahan penyajian laporan keuangan terjadi antara lain pada akun aset lancar, aset tetap, dan belanja modal (Agung Firman Sampurna 2021)

Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan di lingkup pemerintahan baik di pemerintahan pusat dan departemen departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan standar akuntansi pemerintahan diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintah pusat dan daerahDeddi Nordiawan (2012:25)

Penelitian terdahulu menjelaskanPenerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan keuangan seperti penelitian yang dilakukan penelitian Umi Fadilah Fatonil (2021), Mega mustika (2020), Alisha Ristanti Hermawan(2022) dan Dito Aditia Darma (2022) hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

Selain Penerapan standar akuntansi pemerintahan diyakini berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintah, ada peran audit internal yang

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Seperti yang dikatakan Ketua Tim Kehumasan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jabar, Hary Sutrasno dari 24 kabupaten/kota yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), 3 daerah di Jawa Barat mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Daerah yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) itu dikarenakan adanya fraud kecurangan saat penulisan laporan keuangan. Menurut Ketua Tim Kehumasan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jabar, Hary Sutrasno (2019)

Menurut Dadang Suwanda (2013:190) „Aktivitas audit internal berupa penjaminan kualitas (*quality assurance*) berupa review laporan keuangan, review dilakukan berupa pengujian untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang akan diberikan asersi/pendapat oleh manajemen sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

Penelitian terdahulu menjelaskan Audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. seperti penelitian Dewa Ayu (2021) yang menjelaskan Peran Internal Audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Cahmawati (2021) menjelaskan pengaruh negatif peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan ditolak

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada subjek dan periode penelitian. Pada penelitian sebelumnya menggunakan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Wonosobo dan kabupaten Gianyar sebagai subjek dengan periode penelitian dari tahun 2021

Berdasarkan latar belakang serta masih adanya inkonsistensi dari penelitian terdahulu, serta perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah(Survei pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah pengembangan model untuk menemukan produk atau memodifikasi produk sehingga lebih efektif dan efisien, maka dalam kegiatan mengembangkan model akan terjadi kegiatan penelitian dan kegiatan pengembangan dimana untuk kegiatan itu harus dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan (Putra 2013:97).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Terdapat 10 pemda yang memiliki permasalahan yang berdampak terhadap kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Masih terdapat 55 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Penyebabnya, masih ditemukan ketidaksesuaian LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
3. Terdapat fraud kecurangan saat penulisan laporan keuangan yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP)

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bentuk pertanyaan yang dapat memandu peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan, ketika menyusun sebuah rumusan masalah harus memperhatikan teknik perumusan masalah sehingga dalam melaksanakan penelitiannya tidak mengalami kesalahan atau kegagalan (Sugiyono 2015:228).

Dari pemaparan identifikasi masalah yang ada maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas laporan keuangan
2. Seberapa besar pengaruh Audit internal terhadap Kualitas laporan keuangan

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang ditetapkan dan jawabannya terletak pada kesimpulan penelitian (Siyoto 2015:7). Sesuai dengan masalah yang ingin peneliti kaji, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas laporan keuangan
2. Untuk mengetahui seberapa besar Peran Audit internal terhadap Kualitas laporan keuangan

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga sektor publik untuk dapat memecahkan permasalahan secara praktis dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah serta diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah Kota Bandung untuk mengetahui arti pentingnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal pemerintah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

1.5.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis merupakan kegunaan penelitian dari aspek teoritis yakni manfaat penelitian untuk pengembangan ilmu (Soekidjo 2010:13). Oleh karena itu Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para intelektual dan juga oleh para pihak berkepentingan baik pihak pemerintah maupun pihak lainnya yang memerlukan informasi berkaitan dengan penelitian Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai referensi tentang bahan informasi yang digunakan dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal pemerintah.